ANALISIS POTENSI EKONOMI KOTA PAGAR ALAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TESIS

Oleh :

Laili Dimyati

0821206027

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2010

Analisis Potensi Ekonomi Kota Pagar Alam dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pembangunan

Oleh : Laili Dimyati

(Dibawah bimbingan Prof. Dr. Syafrizal, SE,MA dan Prof. Dr. Adrimas, SE,MS)

RINGKASAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu diketahui terlebih dahulu sumber daya atau potensi daerah yang dapat diharapkan berkembang secara optimal. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui potensi ekonomi dan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah serta implikasinya terhadap perencanaan pembangunan Kota Pagar Alam selama tahun 2004 sampai tahun 2008.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pagar Alam tahun 2004 hingga tahun 2008. Data tersebut diperoleh dari survei sekunder, yaitu dengan memanfaatkan data yang telah tersedia pada instansi terkait. Sedangkan analisis dalam tesis ini adalah analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Shift Share*, yang digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi atau sektor-sektor unggulan dan faktor-faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam.

Hasil penelitian menggunakan metode LQ menunjukkan ada lima sektor memiliki indeks LQ > 1 dan merupakan sektor basis atau unggul yang dapat diandalkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian dengan indeks koefisien lokasi sebesar 2.059, sektor jasa-jasa sebesar 1.830, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1.594, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1.567 dan sektor bangunan sebesar 1.521. Sedangkan sektor yang memiliki LQ < 1 atau tidak unggul yaitu

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum pembangunan di suatu negara bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang dimiliki oleh masing-masing negara, antara lain sistem ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas manusia dan kualitas birokrasi. Selain itu, sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam proses pembangunan tersebut serta pola kebijakan yang dilakukan.

Sebagai bangsa dan negara besar yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia hendaknya mampu memanfaatkan sumber daya tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi suatu negara juga memerlukan perencanaan yang terarah, agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Artinya, pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan upaya meningkatkan produktivitas rakyat, menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki, meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja bagi rakyat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan suatu wilayah (propinsi, kabupaten atau kota). Meskipun proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama pembangunan

saat ini. Namun target pertumbuhan tersebut ditentukan oleh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Pemerintah daerah juga sangat berperan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan perencanaan yang terarah dan memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai, agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan upaya meningkatkan produktivitas rakyat, menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki, meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja bagi rakyat.

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, khususnya hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan dilaksanakannya era otonomi daerah secara efektif, atau lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan Kedua Undang-Undang tersebut serta Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998, penyelanggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan alat analisis *Location Quotient* (LQ) dapat disimpulkan bahwa Kota Pagar Alam memiliki 5 (lima) sektor unggulan (LQ > 1), yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor bangunan. Sedangkan sektor yang tidak unggul (LQ < 1) ada 4 (empat) yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik, gas dan air bersih.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan alat analisis *Shift Share* dapat disimpulkan, bahwa selama periode 2004-2008 perubahan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam dipengaruhi oleh faktor luar, baik dari perekonomian Propinsi Sumatera Selatan maupun perekonomian nasional. Sedangkan faktor dari dalam atau struktur ekonomi daerah juga cukup mendukung pertumbuhan ekonomi karena banyak terkonsentrasi pada sektor-sektor yang pertumbuhannya cepat yakni sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Keterkaitan antar sektor juga cukup baik, karena sektor pertanian saling menunjang dengan sektor perdagangan dan jasa. Akan tetapi, kontribusi

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah,* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta.

Aziz, Iwan Jaya, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia*, Bibliografi, LPFE-UI, Jakarta.

Bappeda dan BPS Kota Pagar Alam, 2004. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Pagar Alam.*

Bappeda Kota Pagar Alam, 2007. *Buku Monografi Kota Pagar Alam.*

Bappeda Kota Pagar Alam dan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, 2005. *Studi Kelayakan Pendirian BUMD Pemda Kota Pagar Alam.*

BPS Kota Pagar Alam, 2007. *Pagar Alam Dalam Angka.*

BPS Kota Pagar Alam, 2008. *Pagar Alam Dalam Angka.*

BPS Sumatera Selatan, *2009. Sumatera Selatan Dalam Angka.*

Budiono, 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi,* BPFE, Yogyakarta.

_____ , 1999. *Ekonomi Makro, Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Nomor 2,* BPFE, Yogyakarta.

Djamaluddin, M. Arief, 1996. *"Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Jangka Pendek", Widyapraja*, No. 25 : 33-43.

Glasson, John, 1990. *Pengantar Perencanaan Regional.* Terjemahan Paul Sitohang, Jakarta: LPFEUI.

Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah,* Edisi Pertama, UPP AMP YKPN UGM, Yogyakarta.

Irawan, Drs, 2002. *Ekonomika Pembangunan*, Jogjakarta: BPFE.